



KAJIAN PENGEMBANGAN INDUSTRI PENGOLAHAN PERIKANAN DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL DI KABUPATEN PATI

STUDY OF FISHERIES INDUSTRY DEVELOPMENT IN THE LOCAL ECONOMIC DEVELOPMENT IN PATI REGENCY

Sigit Riyanto¹, Fadjar Hari Mardiansjah²

¹Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah; Jl. Pahlawan no.4 Semarang; sgt_rynt@yahoo.com

²Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota; Universitas Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah; fadjar_mardiansjah@yahoo.com

Info Artikel:

• Artikel Masuk: 14/02/18

• Artikel diterima: 17/05/18

• Tersedia Online: 28/05/18

ABSTRAK

Kabupaten Pati merupakan salah satu daerah di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki potensi perikanan dan kelautan yang cukup besar. Namun hanya sekitar 52,11% (lima puluh dua koma sebelas persen) dari produksi perikanan yang dilakukan pengolahan. Kuantitas jumlah industri pengolahan perikanan mengalami stagnansi bahkan berkurang yang tidak sebanding dengan peningkatan produksi perikanan. Melihat kondisi tersebut maka perlu adanya kajian mengenai pengembangan Industri pengolahan perikanan dalam pengembangan ekonomi lokal di Kabupaten Pati. Pengembangan ekonomi lokal dalam konteks ini sesuai dengan konsep pengembangan wilayah di Kabupaten Pati serta sesuai dengan skala usaha industri pengolahan perikanan yang umumnya berskala usaha kecil dan menengah (IKM). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengembangan industri pengolahan perikanan di Kabupaten Pati menggunakan metode penelitian mix-method, dimana secara kuantitatif untuk mendeskripsikan karakteristik industri pengolahan perikanan dan kualitatif untuk mendeskripsikan kemitraan pemangku kepentingan dan arahan pengembangan industri pengolahan perikanan. Alternatif pengembangan industri pengolahan perikanan di fokuskan pada penyediaan bahan baku, penguatan kelembagaan dan lokasi industri pengolahan perikanan.

Kata Kunci: Industri Pengolahan Perikanan; Pengembangan Ekonomi Lokal; Strategi Pengembangan

ABSTRACT

Pati regency is one of the areas in Central Java Province that has considerable fishery and marine potential. But only about 52.11% (fifty two point eleven percent) of the fishery production is done processing. The quantity of the number of fishery processing industries has stagnated and even decreased which is not proportional to the increase of fishery production. Seeing these conditions, it is necessary to study the development of fishery processing industry in the development of local economy in Pati Regency. The development of local economy in this context is in accordance with the concept of regional development in Pati Regency and in accordance with the scale of business of fishery processing industry which is generally small and medium scale business (SMEs). This study aims to analyze the development of fishery processing industry in Pati Regency using mix-method research method, which quantitatively describes the characteristics of fishery processing industry and qualitative to describe stakeholder partnership and direction of fishery processing industry development. Alternative development of fishery processing industry focused on the supply of raw materials, institutional strengthening and location of the fishery processing industry.

Keyword : Fishery Processing Industry; Local Economic Development; Development Strategy

Copyright © 2016 JPWK-UNDIP

This open access article is distributed under a Creative Commons Attribution (CC-BY-NC-SA) 4.0 International license.

Cara men-sitasi (APA 6th Style):

Riyanto, Sigit., & Hari Mardiansjah, Fadjar. (2018). Kajian Pengembangan Industri Pengolahan Perikanan Dalam Pengembangan Ekonomi Lokal Di Kabupaten Pati . Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota, vol 14 (1), 61 - 71

1. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang menganut sistem pemerintahan desentralisasi, dimana terjadi perubahan paradigma baru dalam hal pembangunan baik administrasi maupun dalam hal kebijakan. Sistem pemerintahan ini memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur pemerintahan dan fungsi-fungsi tertentu sehingga berdampak kepada daerah untuk menggali segala potensi yang ada di wilayah administrasinya sebagai sumber pendapatan daerah guna melaksanakan pembangunan (Kuncoro, 2004). Pemerintah daerah juga memiliki kewenangan yang lebih besar dalam merencanakan arah pembangunannya, namun disisi lain pemerintah daerah dituntut untuk lebih mandiri dalam memecahkan permasalahan pembangunan di daerahnya. Salah satu sektor yang menjadi kewenangan pemerintah daerah adalah pengelolaan sumber daya perikanan (Satria & Matsida, 2004). Sektor ini mampu dijadikan sebagai modal pembangunan bagi daerah yang memiliki keayaan sumber daya perikanan dan kelautan. Salah satu daerah tersebut adalah Provinsi Jawa Tengah. Sesuai dengan tujuan pembangunan industri Provinsi Jawa Tengah 2015-2035 yaitu terwujudnya industri Jawa Tengah yang berdaya saing dan berkesinambungan. Pemerintah Provinsi Jawa tengah menetapkan beberapa industri yang diprioritaskan untuk dikembangkan. Salah satunya adalah industri pengolahan perikanan yang dikembangkan di daerah yang memiliki potensi perikanan dan kelautan. Daerah tersebut antara lain Kabupaten Batang, Brebes, Cilacap, Demak, Kendal, Pati, Kota Tegal, Kota Pekalongan, dan Rembang.

Kabupaten Pati secara geografis bersebelahan dengan Laut Jawa di sepanjang wilayah sebelah utara dan timur sehingga daerah ini memiliki potensi perikanan yang besar baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya. Pada tahun 2015 Kabupaten Pati merupakan kabupaten yang memiliki produksi perikanan terbesar di Provinsi Jawa Tengah. Potensi tersebut dapat dijadikan sebagai bahan baku industri pengolahan perikanan. Industri pengolahan perikanan selain sebagai upaya untuk memanfaatkan produk perikanan juga mampu mengawetkan dan menjaga kualitas produk perikanan yang mudah rusak (Yang et al., 2016) dan memberikan nilai tambah produk perikanan (Bar, 2015). Sehingga produk perikanan mampu memenuhi permintaan dari luar wilayah serta memungkinkan untuk disimpan dalam jangka waktu yang relatif lebih lama. Dari seluruh potensi perikanan dan kelautan di Kabupaten Pati, hanya sekitar 52,11% yang telah dilakukan pengolahan. Potensi perikanan dan kelautan yang ada di Kabupaten Pati dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan lapangan pekerjaan melalui industri pengolahan perikanan. Peningkatan produksi perikanan dan kelautan di Kabupaten Pati tidak sebanding dengan pertumbuhan industri pengolahan perikanan yang relatif stagnan. Sementara pemasaran produk pengolahan perikanan di Kabupaten Pati masih bergantung kepada tengkulak dan pedagang. Konsep pengembangan ekonomi lokal diterapkan di Kabupaten Pati dan berbagai daerah di Indonesia dalam pengembangan wilayah. Hal ini dikarenakan konsep pengembangan ekonomi lokal menjadi konsep pengembangan ekonomi yang sesuai dengan sistem pemerintahan desentralisasi. Dimana, pengembangan ekonomi lokal merupakan konsep pembangunan yang berorientasi pada kegiatan ekonomi lokal serta menekankan pada kebijakan pembangunan lokal (*endogeneous development*) yang memanfaatkan potensi sumber daya manusia lokal, institusi lokal dan sumber daya lokal (Coffey, William & Polese, 1984). Pengembangan ekonomi lokal sesuai untuk diterapkan mengingat skala usaha industri pengolahan perikanan di Kabupaten Pati dalam bentuk usaha mikro kecil menengah (UMKM). Sehingga memerlukan kemitraan antara pemerintah, swasta dan masyarakat untuk mengembangkannya. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk melakukan kajian pengembangan industri pengolahan perikanan dalam pengembangan ekonomi lokal di Kabupaten Pati.

Pembangunan lokal dan regional merupakan pembangunan yang berfokus pada pembangunan ekonomi, meliputi pertumbuhan penyediaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan sebagai upaya untuk mengurangi ketimpangan sosial, keberlanjutan lingkungan, mendorong peran pemerintah dalam mengelola keragaman (Pike, Rodríguez-Pose, & Tomaney 2013). Paradigma pembangunan telah berubah dari konsep pembangunan klasik berbasis keunggulan komparatif dan membangun sektor ekonomi secara homogenisasi menjadi pengembangan ekonomi lokal berbasis pada keunggulan kompetitif dan menjaga kelestarian lingkungan dan menggunakan prinsip pengetahuan sebagai penggerak ekonomi dan kemitraan (Tomlinson, 2008). Pengembangan ekonomi lokal adalah suatu proses dimana

pemerintah daerah dan atau kelompok masyarakat mengelola sumber daya yang ada dan mengambil bagian dalam susunan persekutuan (*partnership*) dengan sektor swasta atau yang lainnya, menciptakan lapangan kerja dan merangsang kegiatan ekonomi dalam zona perekonomian yang telah ditetapkan dengan baik (Blakely, 1984). Pengembangan ekonomi lokal sebagai peningkatan peran elemen-elemen *endogenous* dalam kehidupan sosial ekonomi suatu lokalitas dengan tetap melihat keterkaitan serta integrasinya secara fungsional dan spasial dengan wilayah yang lebih luas (Coffey, William & Polese, 1984).

Industri pengolahan perikanan adalah usaha pengolahan hasil perikanan/organisme yang hidup di air untuk tujuan komersial/industri baik hasil budidaya maupun hasil tangkap (Thrane, Nielsen, & Christensen, 2009). Usaha pengolahan ikan merupakan istilah umum yang mendefinisikan penanganan pasca produksi tangkap atau panen budidaya menggunakan sarana prasarana dan teknologi. Pengolahan perikanan dilakukan untuk meningkatkan nilai tambah terhadap produk perikanan dan berfungsi untuk mengawetkan ikan karena bersifat mudah rusak dan busuk (Bar, 2015). Industri pengolahan perikanan dilakukan sesuai dengan jenis komoditas ikan serta selera konsumen. Secara teknik industri pengolahan perikanan terbagi menjadi industri pengolahan tradisional dan modern. Industri pengolahan perikanan tradisional seperti pemanggangan, pemindangan, pengeringan, pengasinan dan pengolahan lain menggunakan peralatan dan teknik sederhana. Sementara industri pengolahan perikanan modern seperti pembekuan, pengalengan dan diversifikasi olahan lain yang telah menggunakan inovasi teknologi. Menurut Freeman (1984) pemangku kepentingan merupakan kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi atau yang terpengaruhi selama proses pencapaian tujuan suatu organisasi. Sementara analisis pemangku kepentingan merupakan suatu proses mengidentifikasi individu, kelompok, dan organisasi yang dipengaruhi atau dapat mempengaruhi lingkungan dan generasi yang akan datang serta memprioritaskan individu-individu yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan (Reed et al., 2009). Terdapat tiga tahapan dalam analisis pemangku kepentingan, yaitu identifikasi pemangku kepentingan, mengklasifikasikan pemangku kepentingan dan menyelidiki hubungan antar pemangku kepentingan (Reed et al., 2009). Kemitraan antar pemangku kepentingan dalam industri pengolahan perikanan mutlak diperlukan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Mengingat skala industri pengolahan perikanan di Kabupaten Pati berskala UMKM. Pola kemitraan yang dapat dilakukan dalam industri pengolahan perikanan sesuai dengan undang-undang tersebut adalah pola inti-plasma, subkontrak, waralaba, keagenan, bagi hasil, perdagangan umum, dan kemitraan lainnya.

2. DATA DAN METODE

2.1 Gambaran Umum Wilayah Studi

Kabupaten Pati merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang topografi wilayah berbentuk daerah pantai, dataran rendah, daratan tinggi dan pegunungan. Kabupaten Pati memiliki garis pantai sepanjang 60 km dan daerah pantai meliputi 16 kecamatan dari 21 kecamatan. Secara umum pengaturan pola ruang Kabupaten Pati meliputi pengembangan kawasan lindung, kawasan budidaya dan kawasan strategis. Kawasan budidaya terdiri dari kawasan pertanian dan nonpertanian. Salah satu kawasan peruntukan nonpertanian adalah kawasan industri besar, sedang dan rumah tangga. Kawasan peruntukan industri perikanan besar terdapat di Kecamatan Batangan luasnya 318 Ha, Kecamatan Juwana luas 102 Ha. Sementara industri kecil dan rumah tangga dapat dikembangkan diseluruh wilayah Kabupaten Pati. Struktur perekonomian terbesar di kabupaten Pati adalah sektor pertanian, industri pengolahan dan perdagangan. Pada tahun 2015 subsektor perikanan memiliki kontribusi sebesar 14,69% terhadap sektor pertanian atau sebesar 3,92% terhadap struktur PDRB Kabupaten Pati. Pada tahun 2015, produksi perikanan dan kelautan merupakan produksi terbesar di Provinsi Jawa Tengah. Pada tahun 2015, Kabupaten Pati memiliki 788 unit industri pengolahan perikanan yang terdiri dari pemindangan, pemanggangan, pengeringan, pembekuan, filleting, dan diversifikasi olahan lainnya. Industri pengolahan perikanan tersebar di 17 kecamatan yang menjadi wilayah studi penelitian, yaitu di kecamatan Kecamatan Juwana, Tayu, Batangan, Dukuhseti, Margoyoso, Wedarijaksa, Trangkil, Pati, Sukolilo, Kayen, Winong, Gabus, Jaken,

Jakenan, Tambakromo, Gembong dan Margorejo. Adapun peta wilayah studi dapat dilihat dalam Gambar 1 berikut ini.



Gambar 1. Peta Wilayah Studi Penelitian (Hasil Analisis, 2017)

2.2 Metodologi Penelitian

Penelitian mengenai kajian pengembangan industri pengolahan perikanan dalam pengembangan ekonomi lokal di Kabupaten Pati menggunakan metode kombinasi/mix-method. Metode penelitian kombinasi menurut Creswel (2014) adalah pendekatan penelitian yang menggabungkan atau menghubungkan metode penelitian kuantitatif dan kualitatif. Analisis kuantitatif dilakukan dengan dukungan teori, hipotesis dan fenomena yang berkembang pada saat ini. Selain itu penelitian ini juga berbasis pada parameter-parameter yang disusun dengan menggunakan data sekunder maupun data primer untuk mengidentifikasi karakteristik industri pengolahan perikanan di Kabupaten Pati menggunakan kuesioner. Identifikasi kerja sama/kemitraan dilakukan melalui wawancara (*indepth-interview*) dan telaah dokumen melalui analisis pemangku kepentingan secara deskriptif kualitatif. Arah pengembangan industri pengolahan perikanan berdasarkan hasil identifikasi tersebut menggunakan metode deskriptif kualitatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Identifikasi Karakteristik Industri Pengolahan Perikanan di Kabupaten Pati

Berdasarkan hasil kuesioner terhadap pelaku usaha perikanan dan kelautan yaitu pengolah perikanan dan pengamatan di lapangan kondisi bahan baku industri pengolahan perikanan di Kabupaten

Pati mencukupi dan kontinyu sepanjang tahun serta memiliki kualitas yang baik. Hal ini dikarenakan telah dilengkapi oleh sarana prasarana pendukung seperti *cold storage* dan kapal serta transportasi yang memiliki pendingin/freezer. Sumber daya manusia pengolah perikanan berasal dari tenaga kerja lokal daerah dan umumnya memiliki kualitas yang relatif rendah. Ketrampilan dan pelatihan kerja dilakukan melalui praktek dan pengamatan secara langsung dilapangan dimulai dengan pekerjaan yang tidak memiliki resiko. Upah tenaga kerja umumnya memiliki sistim borongan dan harian. Lokasi industri pengolahan perikanan umumnya berdekatan dengan bahan baku karena sifat ikan yang mudah rusak dan busuk. Sehingga industri pengolahan perikanan berada di sepanjang wilayah yang berbatasan dengan Laut Jawa. Selain mempertimbangkan bahan baku, lokasi industri pengolahan perikanan juga mempertimbangkan kedekatan dengan lokasi pemasaran mengingat kualitas produk olahan yang relatif rendah dan tidak bertahan lama. Permodalan industri pengolahan perikanan telah didukung oleh Lembaga Keuangan/Bank melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Dimana proses pengajuannya dipermudah oleh Bank dengan melengkapi beberapa persyaratan misalnya ijin usaha mikro kecil (IUMK). Besarnya pendapatan dari industri pengolahan sesuai dengan modal usaha dan omset penjualan. Industri pengolahan perikanan di Kabupaten Pati telah didukung sarana prasarana infrastruktur yang baik. Kondisi jalan serta kapasitas jalan telah mendukung transportasi. Sementara transportasi memiliki kualitas yang baik karena telah dilengkapi dengan pendingin/freezer sehingga mampu mempertahankan kualitas bahan baku maupun produk hasil pengolahan perikanan dan kelautan.

Pemerintah Kabupaten Pati senantiasa melaksanakan penelitian dan pengembangan melalui Bidang Litbang Bappeda serta inovasi teknologi dengan bekerja sama dengan Perguruan Tinggi. Untuk mendukung pengembangan industri pengolahan perikanan pemerintah senantiasa melakukan pelatihan, pembinaan dan pendampingan. Di masing-masing sentra industri pengolahan perikanan telah tumbuh klaster/kelompok pengolah, bahkan beberapa kelompok telah tumbuh membentuk lembaga koperasi yang bergerak di sektor riil maupun simpan pinjam. Lembaga kelompok pengolah tersebut digunakan sebagai wadah kemitraan antara pemerintah, swasta dan masyarakat. Kemitraan antara pemerintah dengan masyarakat telah terjalin dengan kuat sementara kemitraan antar masyarakat dan swasta terutama industri besar pengolahan perikanan masih relatif lemah dan terbatas pada pengadaan bahan baku melalui *cold storage* dan bahan pendukung melalui koperasi dengan sistim perdagangan umum. Industri pengolahan perikanan di Kabupaten Pati telah didukung berbagai prasarana listrik, telekomunikasi, air, dan sebagainya. Namun peralatan yang digunakan umumnya masih sederhana karena teknik pengolahannya bersifat sederhana. Dalam pengadaan bahan baku perikanan laut telah didukung 8 (delapan) unit Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) atau Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Untuk mendukung ketersediaan dan kontinuitas bahan baku telah terdapat 8 unit *cold storage* milik swasta. Telah terdapat pengelolaan sampah yang relatif baik, dimana sampah padat yang dihasilkan dari industri pengolahan perikanan umumnya dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan tepung ikan atau sebagai pakan ternak. Sementara air limbah pengolahan perikanan belum dikelola dengan baik dengan dibuang secara langsung ke sungai. Karena pengolahan serta peralatan yang masih sederhana, sanitasi pengolahan masih relatif kurang diperhatikan. Beberapa pengolahan masih dilakukan di lantai dan menggunakan air dari sungai untuk mencairkan ikan.

Pemasaran produk perikanan telah menjangkau berbagai daerah di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan dan Bali. Bahkan beberapa produk pengolahan perikanan telah menjangkau pasar ekspor seperti di Taiwan, Jepang dan beberapa negara di Asia Tenggara. Permintaan produk perikanan senantiasa bertambah sebanding dengan kenaikan angka konsumsi ikan. Namun strategi pemasaran produk pengolahan perikanan masih tergantung kepada pedagang/tengkulak melalui pemesanan/*job order* dan belum memanfaatkan media elektronik dalam mempromosikan produk pengolahan perikanan. Hubungan antar masyarakat dan swasta terutama industri besar lebih bersifat saling bersaing terutama dalam hal perolehan bahan baku dan pemasaran produk pengolahan perikanan. Industri pengolahan perikanan di Kabupaten Pati telah didukung kemudahan dalam hal perijinan usaha secara terpadu satu pintu. Sementara izin usaha mikro kecil (IUMK) dapat dilakukan di tingkat kecamatan. Terdapat keterkaitan ekonomi yang tinggi antar pelaku usaha dan pelaku utama dalam industri pengolahan perikanan mulai dari

nelayan, pembudidaya maupun pedagang pengumpul dalam pengadaan bahan baku. Sampai pada tenaga kerja pengolahan dan pemasar produk pengolahan perikanan.

Jiwa kewirausahaan dan kepemimpinan masyarakat pelaku usaha pengolahan perikanan harus senantiasa dilakukan pelatihan dan pembinaan serta kerja sama harus sentiasa didorong untuk meningkatkan kemitraan antar pelaku usaha pengolahan perikanan. Pemerintah Kabupaten Pati telah menetapkan pola ruang melalui Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati Tahun 2010-2030. Dimana kawasan peruntukan industri besar perikanan dapat dikembangkan di Kecamatan Juwana dan Batangan. Sementara industri pengolahan perikanan berskala mikro, kecil dan menengah dapat dikembangkan diseluruh kecamatan. Sehingga harga sewa lahan di beberapa kawasan terutama di kawasan padat industri yang dianggap memberatkan bagi pelaku usaha pengolahan perikanan dapat dihindari melalui pendirian unit pengolahan ikan di wilayah lahan milik pribadi masyarakat.

3.2 Identifikasi Pemangku Kepentingan Industri Pengolahan Perikanan

Pemangku kepentingan industri pengolahan perikanan dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pemangku kepentingan kunci, utama dan pendukung (Crosby, 1991). Dimana pengelompokan tersebut berdasarkan peran pemangku kepentingan dalam industri pengolahan perikanan di Kabupaten Pati. Peran dari pemangku kepentingan dalam industri pengolahan perikanan dapat berbentuk regulator, implementator, fasilitator, advocator maupun evaluator (Nurfatriani et al., 2015). Adapun pemangku kepentingan tersebut adalah tersaji dalam tabel 1 sebagai berikut.

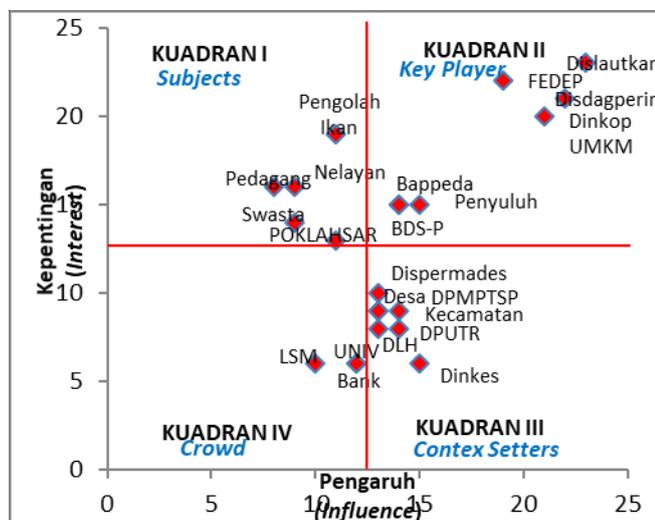
Tabel 1. Pemangku Kepentingan Industri Pengolahan Perikanan di Kabupaten Pati (Analisis Peneliti, 2017)

Stakeholder Kunci	Stakeholder Utama	Stakeholder Penunjang
Merupakan inisiator secara legalitas memiliki kewenangan pengambilan kebijakan yang terdiri dari instansi pemerintah yang terkait langsung dengan industri pengolahan perikanan <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Kelautan dan Perikanan • Dinas Perindustrian dan Perdagangan • Dinas Koperasi dan UMKM • Bappeda • Dinas PUPR • Dinas Penanaman Modal PTSP • Dinas Lingkungan Hidup • Dinas Kesehatan • FEDEP • Kecamatan,Desa • BDS-P • Penyuluh Perikanan 	Merupakan sektor swasta, pelaku usaha yang mengimplementasikan kebijakan dalam aktifitas bisnis dan terkena dampak dari kebijakan <ul style="list-style-type: none"> • Kelompok Pengolah dan Pemasar (POKLAHSAR) Ikan • Pengolah perikanan • Nelayan • Pembudidaya ikan • Pemasar/pedagang kecil • Tengkulak/pedagang besar • Industri besar pengolahan perikanan 	Merupakan pihak yang tidak memiliki kaitan secara langsung namun memiliki kepedulian terhadap kebijakan termasuk pemerhati dan pemberi masukan dan kritik <ul style="list-style-type: none"> • Akademisi (Universitas atau peneliti yang meneliti tentang industri pengolahan perikanan) • Lembaga keuangan (Bank dan Koperasi) • LSM

3.3 Klasifikasi Pemangku Kepentingan Industri Pengolahan Perikanan

Menurut Eden dan Ackerman (1998) dalam Reed et al.,(2009) pengelompokan *stakeholder* terbagi ke dalam 4 (empat) kelompok berdasarkan hasil matriks pengaruh dan kepentingan. Pengaruh berhubungan dengan kekuatan yang dimiliki oleh *stakeholder* untuk mengontrol proses dan hasil dari suatu keputusan menggunakan variabel kekuatan (*power*), yaitu kekuatan kompensasi, kekuatan individu, kekuatan kondisi, kekuatan kelayakan dan kekuatan organisasi (Galbraith 1983 dalam Reed et al., 2009). Sementara kepentingan berhubungan dengan kebutuhan *stakeholder* didalam pencapaian output dan

tujuan (Reed et al., 2009) yang terdiri dari variabel keterlibatan stakeholder, produksi, habitat, carrier dan fungsi informasi (de Groot et al, 2006 dalam Reed et al., 2009). Adapun pengelompokan stakeholder industri pengolahan perikanan di Kabupaten Pati ditunjukkan pada gambar 2 sebagai berikut:



Gambar 2. Matriks Pengaruh dan Kepentingan Pemangku Kepentingan Industri Pengolahan Perikanan di kabupaten Pati (Analisis Penyusun, 2017)

Kuadran I yaitu kelompok Subjects yaitu kelompok pemangku kepentingan yang memiliki kepentingan tinggi namun pengaruh yang rendah. Kelompok tersebut adalah kelompok pelaku usaha dan pelaku utama perikanan dan kelautan yang terdiri dari masyarakat pengolah perikanan, pedagang/tengkulak, nelayan dan pembudidaya, industri besar (swasta) pengolahan perikanan, dan kelompok pengolah perikanan (POKLAHSAR). Kelompok ini bertindak sebagai pelaku industri pengolahan perikanan dan bersifat supportive karena memiliki kapasitas yang kecil untuk mempengaruhi atau mengubah situasi. Kuadran II yaitu kelompok Key Players yang memiliki pengaruh dan kepentingan yang tinggi. Kelompok ini terdiri dari Dislautkan, Disdagperin, Dinkop UMKM, FEDEP, Penyuluh perikanan, Bappeda, dan BDS-P (Businnes Development Services Provider). Kelompok ini merupakan kelompok kritis atau pelaku utama dalam industri pengolahan perikanan karena secara legalitas kelompok ini memiliki pengaruh kekuatan dan kewenangan yang tinggi serta memiliki tanggung jawab terhadap industri pengolahan perikanan sehingga memiliki kebutuhan yang tinggi terhadap pencapaian tujuan organisasi. Kuadran III adalah Context Setters yang memiliki pengaruh tinggi namun memiliki kepentingan rendah. Kelompok ini terdiri dari Dispermades, DPUTR, DLH, DPMPTSP, Dinkes, Kecamatan dan Desa. Pemangku kepentingan ini memiliki peran dalam industri pengolahan perikanan sesuai dengan tugas pokok fungsinya masing-masing namun memiliki tanggung jawab yang relatif rendah atau memiliki keterkaitan secara tidak langsung. Pemangku kepentingan ini merupakan kelompok yang harus dipantau karena dapat menimbulkan resiko yang signifikan. Kuadran IV adalah Crowd yang memiliki pengaruh dan kepentingan rendah namun kelompok ini dapat mengalami perubahan terkait pengaruh dan kepentingannya. Sehingga kelompok ini perlu menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Meskipun memiliki pengaruh dan kepentingan yang rendah, pemangku kepentingan ini mendukung industri pengolahan perikanan. Kelompok ini terdiri dari Perguruan Tinggi, Lembaga Keuangan/Bank, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Berikut matrik pengaruh dan kepentingan industri pengolahan perikanan di Kabupaten Pati.

3.4 Hubungan Pemangku Kepentingan Industri Pengolahan Perikanan

Hubungan pemangku kepentingan industri pengolahan perikanan dapat berpotensi saling bekerja sama, saling melengkapi dan konflik (Reed et al., 2009). Hubungan pemangku kepentingan industri pengolahan perikanan diilustrasikan menggunakan matriks actor-linkage. Dimana pemangku kepentingan terdapat pada baris dan kolom, sementara hubungan pemangku kepentingan terdapat didalamnya.

Adapun hubungan pemangku kepentingan industri pengolahan perikanan di Kabupaten Pati ditunjukkan pada tabel 2 berikut.

Tabel 2. Hubungan Pemangku Kepentingan Industri Pengolahan Perikanan (Analisis Penyusun, 2017)

	Instansi Pemerintah	Masyarakat	Swasta Bisnis	Perguruan Tinggi	Bank	LSM
Instansi Pemerintah	A,B	A,C	A,C	A	A	A,B,C
Masyarakat	A,C	A,B,C	A,B,C	A	A	A,B
Swasta Bisnis	A,C	A,B,C	A,B,C	A	A	A,C
Universitas	A	A	A	A,B	A	A,B
Bank	A	A	A	A	A,B	A,B
LSM	A,B,C	A,B	A,C	A,B	A,B	A,B

Keterangan : A) Kerja sama; B) Saling melengkapi; C) Konflik

Hubungan yang terjadi antara pemerintah yang terdiri dari dinas teknis seperti Dislautkan, Disdagperin, Dinkop UMKM, FEDEP, Bappeda, DPMPSTP, DPUTR, Dispermades, DLH, Penyuluh perikanan, BDS-P berpotensi saling bekerja sama dan saling melengkapi. Fungsi dari pemerintah adalah menumbuhkan iklim usaha yang sehat untuk mengembangkan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) melalui pembuatan kebijakan, mengimplementasikan kebijakan, melakukan evaluasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing instansi. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan hubungan kerja sama dan saling melengkapi. Hubungan antara pemerintah dengan masyarakat pelaku utama dan pelaku usaha pengolahan perikanan yang terdiri dari nelayan, pembudidaya, pemasar dan pengolah perikanan berpotensi saling bekerja sama dan konflik. Kerja sama antara pemerintah dan masyarakat mutlak diperlukan mengingat keterbatasan masyarakat dalam hal informasi pasar, pengetahuan, modal dan perkembangan regulasi. Potensi konflik dapat terjadi apabila terdapat kebijakan yang dirasakan tidak berpihak kepada masyarakat seperti kebijakan pelarangan kapal cantrang yang dirasakan memberatkan nelayan.

Hubungan antar masyarakat berpotensi saling bekerja sama dan menimbulkan konflik. Kerja sama antar masyarakat dapat dilakukan mulai dari pengadaan bahan baku sampai pemasaran produk perikanan. Sementara konflik dapat terjadi karena persaingan usaha dan kesenjangan sosial. Hubungan tersebut juga terjadi antara masyarakat dengan industri besar pengolahan perikanan. Dimana hubungan antara masyarakat dengan industri besar berpotensi kerja sama dan konflik. Hubungan antara masyarakat dengan perguruan tinggi berpotensi saling bekerja sama dimana masyarakat digunakan sebagai objek penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan program pengabdian kepada masyarakat. Hubungan antara masyarakat dengan Lembaga keuangan/Bank berpotensi bekerja sama. Masyarakat membutuhkan Lembaga keuangan dalam hal pembiayaan permodalan dan transaksi bisnis. Hubungan antara masyarakat dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) berpotensi kerja sama dan saling melengkapi. Hal ini karena LSM sebagai perantara aspirasi masyarakat dan bertugas dalam pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan, pembinaan dan peningkatan kapasitas masyarakat.

3.5 Kerja sama/Kemitraan Pemangku Kepentingan Industri Pengolahan Perikanan

Kerja sama/kemitraan yang terjadi antar pelaku usaha pengolahan perikanan terbatas pada kemitraan pengadaan bahan pendukung besek dan tali pada proses pengolahan pemindangan dari Koperasi Rukun Mina Barokah, dan kemitraan modal dari Koperasi BMT binsani dan Kopwan Mina Melati milik kelompok pengolah. Kemitraan pelaku usaha pengolahan perikanan dengan swasta industri besar berbentuk pola perdagangan umum dalam bentuk pengadaan bahan baku melalui Cold Storage dan perusahaan menerima dan membeli beberapa produk tertentu pengolahan perikanan dari masyarakat. Kerja sama/kemitraan antara pelaku usaha pengolahan perikanan dengan pemerintah dalam bentuk pendidikan dan pelatihan, bantuan peralatan, penelitian dan pengembangan teknologi, pelayanan informasi dan konsultasi, fasilitasi promosi dan perantara antar pelaku pengolahan perikanan. Kemitraan pelaku usaha pengolahan perikanan dengan Lembaga Keuangan/Bank dalam bentuk kerja sama

pembiayaan permodalan usaha melalui program kredit mitra usaha/Kredit Usaha Rakyat (KUR). Kemitraan pelaku usaha pengolahan perikanan dengan Perguruan Tinggi dalam bentuk penelitian dan pengembangan teknologi, pelatihan teknis dan pembinaan. Sementara kemitraan pelaku usaha pengolahan perikanan dengan LSM adalah pelatihan dan pembinaan dalam rangka peningkatan kualitas dan pemberdayaan masyarakat.

3.6 Analisis Arahan Pengembangan Industri Pengolahan Perikanan di Kabupaten Pati

Strategi pengembangan industri pengolahan perikanan di Kabupaten Pati berdasarkan hasil identifikasi karakteristik industri pengolahan perikanan dan identifikasi kerja sama/kemitraan yang telah dilakukan. Dari hasil identifikasi tersebut dapat diketahui potensi dan permasalahan industri pengolahan perikanan di Kabupaten Pati. Sehingga dapat diformulasikan beberapa alternatif strategi sebagai arahan pengembangan industri pengolahan perikanan dalam pengembangan ekonomi lokal di Kabupaten Pati. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui wawancara secara mendalam terhadap beberapa informan dari pemangku kepentingan yang terlibat di dalam industri pengolahan perikanan. Alternatif strategi pengembangan industri pengolahan dirumuskan berdasarkan 12 faktor yang mempengaruhi industri pengolahan perikanan yang telah diuraikan di dalam karakteristik industri pengolahan perikanan. Adapun alternatif arahan pengembangan industri pengolahan perikanan di Kabupaten Pati dalam pengembangan ekonomi lokal di Kabupaten Pati ditunjukkan pada tabel 3 sebagai berikut:

Tabel 3. Alternatif Strategi Pengembangan Industri Pengolahan Perikanan di Kabupaten Pati
(Analisis Penyusun, 2017)

No.	Faktor	Strategi Pengembangan	Aktor Terlibat
1	Bahan baku	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan sistim rantai dingin • Pembangunan <i>cold storage</i> perikanan budidaya • Peningkatan kerja sama/kemitraan penyedia bahan baku dengan industri pengolahan perikanan 	Dislautkan, penyuluh perikanan, Swasta, Nelayan dan pembudidaya, pengolah perikanan, pedagang dan tengkulak.
2	Sumber daya manusia	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kapasitas SDM pengolahan perikanan • Pelatihan dan pembinaan SDM pengolahan perikanan • Memasukkan teknik pengolahan perikanan ke dalam kurikulum SMK 	Dislautkan, penyuluh perikanan, Dinkop UMKM, Disdagperin, FEDEP, BDS-P, swasta, Kelompok pengolah/POKLAHSAR, LSM, Dinas Pendidikan
3	Lokasi industri	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan industri pengolahan perikanan yang terintegrasi dengan bahan baku di kawasan minapolitan 	Dislautkan, Kecamatan, Desa, DPUTR, Pengolah perikanan
4	Modal dan Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi dan pendampingan pembiayaan permodalan 	Dislautkan, FEDEP, Dinkop UMKM, BDS-P, Lembaga keuangan, pengolah perikanan, penyuluh perikanan, kelompok pengolah (POKLAHSAR)
5	Infrastruktur	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan aksesibilitas, pemeliharaan infrastruktur dan peningkatan kualitas angkutan umum 	Dislautkan, DPUTR, Kecamatan, Desa, swasta
6	Pengetahuan dan teknologi	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kerja sama dengan lembaga pengembangan dan penelitian • Pelatihan dan pembinaan inovasi teknologi • Studi banding ke pengolahan modern 	Dislautkan, Bappeda, FEDEP, Disdagperin, Dinkop UMKM, Perguruan tinggi, pengolah perikanan, swasta, penyuluh perikanan
7	Kelembagaan	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan kelembagaan kelompok pengolah perikanan • Pembinaan dan pendampingan kelembagaan • Peningkatan kemitraan pemerintah, pelaku usaha dan pelaku utama perikanan dan kelautan, serta swasta 	Dislautkan, FEDEP, swasta, pelaku usaha dan pelaku utama perikanan dan kelautan, BDS-P, Disdagperin, Dinkop UMKM, penyuluh perikanan
8	Sarana prasarana	<ul style="list-style-type: none"> • Bantuan peralatan • Pembinaan dan pendampingan pengelolaan 	Dislautkan, Disdagperin, Dinkop UMKM, FEDEP, BDS-P, Penyuluh perikanan, DLH, Dispermades, Desa,

No.	Faktor	Strategi Pengembangan	Aktor Terlibat
		sampah dan limbah <ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan IPAL komunal di sentra industri • Perluasan jaringan air bersih dan PAMSIMAS • Pembinaan dan pelatihan teknologi • Pengembangan BUM Desa bidang perikanan dan kelautan 	Kecamatan, swasta, pengolah ikan, penyuluh perikanan, BDS-P, Perguruan tinggi, LSM, PDAM
9	Pasar dan pemasaran	<ul style="list-style-type: none"> • Kampanye dan sosialisasi GEMARI (gemar makan ikan) • Pameran lokal, nasional maupun internasional • Peningkatan kualitas olahan, <i>branding</i>, <i>packing</i>, <i>labelling</i> dan diversifikasi olahan • Promosi menggunakan media sosial dan elektronik • Peningkatan peran Pasar Pragolo sebagai pasar produk unggulan daerah • Regulasi penjualan produk lokal di supermarket, swalayan dan waralaba dan penetapan standarisasi produk 	Dislautkan, Disdagperin, Dinkop UMKM, FEDEP, swasta, penyuluh perikanan, BDS-P, pengolah perikanan, pedagang/tengkulak, kelompok pengolahan perikanan (POKLAHSAR), Perguruan Tinggi
10	Budaya bisnis	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi dan pendampingan pengurusan perizinan • Pelatihan dan pembinaan kerja sama 	DPMPSTP, Dislautkan, Disdagperin, Dinkop UMKM, BDS-P, Penyuluh perikanan, Kecamatan, Desa, POKLAHSAR, LSM
11	Identitas masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan dan pembinaan kewirausahaan, kerja sama dan kepemimpinan 	Dislautkan, Dinkop UMKM, FEDEP, Disdagperin, BDS-P, Penyuluh, POKIAHSAR, pengolah perikanan
12	Fisik	<ul style="list-style-type: none"> • Penggunaan lahan desa untuk industri pengolahan perikanan melalui BUM Desa 	Desa, Kecamatan, swasta, pengolah perikanan

4. KESIMPULAN

Industri pengolahan perikanan di Kabupaten Pati umumnya berbentuk usaha mikro kecil menengah (UMKM). Dimana pengolahannya masih sederhana dan dilakukan oleh sumber daya manusia yang relatif rendah. Sanitasi proses pengolahan kurang diperhatikan oleh para pelaku usaha pengolahan perikanan. Sehingga produk hasil pengolahan perikanan memiliki kualitas yang relatif rendah dan tidak tahan lama. Industri pengolahan perikanan di Kabupaten Pati telah didukung oleh sarana dan prasarana sehingga mampu menjamin ketersediaan dan kontinuitas bahan baku. Infrastruktur dan mode transportasi telah mendukung industri pengolahan perikanan sehingga kualitas bahan baku maupun produk olahan dapat dipertahankan. Pemasaran produk pengolahan perikanan telah menjangkau ke beberapa wilayah. Namun strategi pemasarannya masih tergantung kepada pedagang dengan sistem job order dan pemesanan. Di sentra industri pengolahan perikanan telah berkembang kelompok pengolahan perikanan. Beberapa diantaranya telah berkembang menjadi koperasi sektor riil dan simpan pinjam. Terdapat 22 (dua puluh dua) pemangku kepentingan yang terlibat dalam industri pengolahan perikanan di Kabupaten Pati yang terdiri dari pemerintah, swasta dan masyarakat. Hubungan pemangku kepentingan berpotensi saling bekerja sama, saling melengkapi dan konflik. Meskipun demikian, hubungan kemitraannya masih relatif lemah dan terbatas pada pola perdagangan umum.

Berdasarkan hasil identifikasi tersebut, dapat diketahui potensi dan permasalahan dalam industri pengolahan perikanan di Kabupaten Pati. sehingga dapat dirumuskan alternatif strategi sebagai arahan pengembangan industri pengolahan perikanan dalam pengembangan ekonomi lokal di Kabupaten Pati. Alternatif strategi tersebut antara lain peningkatan kapasitas masyarakat melalui pelatihan, pembinaan dan pendampingan dalam bidang bahan baku, proses pengolahan, modal, maupun pemasaran produk pengolahan. Peningkatan kelembagaan kelompok pengolahan perikanan sehingga mendorong adanya kemitraan antara pemerintah, swasta dan masyarakat. Peningkatan pemasaran melalui pameran ditingkat nasional maupun internasional. Adanya regulasi perlindungan produk lokal dan standarisasi produk. Serta peningkatan kualitas produk pengolahan perikanan melalui inovasi teknologi, *branding dan labelling*.

5. PERNYATAN RESMI

Terima kasih kepada seluruh pihak, khususnya Pusbindiklatren Bappenas yang telah memberi kesempatan dan dukungan pembiayaan selama menjalani masa tugas belajar.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Bar, E. S. (2015). *A case study of obstacles and enablers for green innovation within the fish processing equipment industry*. *Journal of Cleaner Production*, 90, 234–243. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2014.11.055>
- Blakely, E. J. (2008). *Planning local economic development: Theory and Practice* by Edward J Blakely, Sage Publication (December 2014), 37–41. <http://doi.org/10.1080/03768359008439548>
- Bryson, J. M. (2004). *Stakeholder Identification and Analysis Techniques*.
- Coffey, William & Polese, M. (1984). *The Concept Of Local development: a Stages Model Of Endogeneous Regional Growth*.
- Creswel, J. W. (2014). *Research Design : Qualitative, Quantitative And Mixed Methods Approaches Research Design*.
- Crosby, B. B I., (1991) *Stakeholder Analysis: A vital tool for Strategic Managers*. (2), 1-6
- Kuncoro, Mudrajat. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Jakarta: Erlangga
- Nurfatriani, F., Darusman, D., Nurrochmat, D. R., & Yustika, A. E. (2015). Analisis Pemangku Kepentingan dalam Transformasi Kebijakan Fiskal Hijau. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 12(2), 105–124. <https://doi.org/10.20886/jakk.2015.12.2.105-124>
- Pike, A., Rodríguez-Pose, A., & Tomaney, J. (2013). *Local and regional development in the Global North and South*. *Progress in Development Studies*, 14(1), 21–30. <https://doi.org/10.1177/1464993413504346>
- Reed, M. S., Graves, A., Dandy, N., Posthumus, H., Hubacek, K., Morris, J., ... Stringer, L. C. (2009). *Who 's in and why? A typology of stakeholder analysis methods for natural resource management*. *Journal of Environmental Management*, 90(5), 1933–1949. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2009.01.001>
- Satria, A., & Matsida, Y. (2004). *Decentralization Policy: An Opportunity for Strengthening Fisheries Management System?*, 13(2), 179–196. <https://doi.org/10.1177/1070496504264969>
- Thrane, M., Nielsen, E. H., & Christensen, P. (2009). *Cleaner production in Danish fish processing – experiences, status and possible future strategies*. *Journal of Cleaner Production*, 17(3), 380–390. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2008.08.006>
- Tomlinson, R. (2008). *Planning local economic development : Theory and Practice*, By Edward J Blakely, Sage publications, Newbury Park, 1989, (December 2014), 37–41. <https://doi.org/10.1080/03768359008439548>
- Yang, Z., Li, S., Chen, B., Kang, H., & Huang, M. (2016). *China's Aquatic product Processing Industry : Policy Evolution and Economic Performance*. *Trends in Food Science & Technology*. <https://doi.org/10.1016/j.tifs.2016.09.004>